



SUMBER BERITA

SELASA, 17 JULI 2019

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
x	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Warga Lebong Tandai Datangi Kejari

ARGA MAKMUR, BE - Puluhan warga Desa Lebong Tandai Kecamatan Napal Putih, BU mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) BU kemarin (16/7).

Warga ini datang untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan Kepala Desa Lebong Tandai, Supriyadi B oleh pihak kejaksaan atas tindak pidana pemalsuan tanda tangan bendahara desa atas nama Desi Lestari guna pencairan DD tahap pertama tahun 2018.

Salah seorang warga Lebong Tandai, Gunawan Efendi mengatakan, pihaknya bersama rombongan yang berjumlah 37 orang telah membawa beberapa alat bukti, agar diterimanya tuntutan penangguhan penahanan kades tersebut.

Alat bukti berupa surat pernyataan perdamaian antara kades dan bendahara pada Desember 2018, serta surat pernyataan dari bendahara yang berisikan bahwa tidak akan menuntut kades setelah ditandatanganinya surat perdamaian antara kedua belah pihak yang dihadiri Camat, Ketua BPD dan anggota, ketua adat, tokoh adat dan tokoh agama desa.

"Ya tujuan kami ke sini untuk meminta penangguhan kades kami, hal ini kami lakukan sesuai dengan surat pernyataan perdamaian waktu itu dibuat dihadiri Camat, Ketua BPD dan anggota, ketua adat, tokoh adat dan tokoh agama desa," kata Gunawan.

Gunawan juga menambahkan, pihaknya juga membawa surat pernyataan yang ditandatangani oleh 168 warga desa untuk tuntutan penangguhan penahanan kades. Dikarenakan warga Desa Lebong Tandai sangat butuh kepala desa, karena dana desa sudah cair, kegiatan sudah harus berjalan. Maka dari itu para warga meminta penangguhan, karena warga menilai masalah kades ini terindikasi ada kepentingan sepihak, dan para warga pun menilai kadesnya sudah bekerja dengan baik.

"Memang untuk pemalsuan tanda tangan tersebut dilakukan oleh kades, namun itu berdasarkan atas kesepakatan semua warga, kami semua saksinya. Karena pada waktu itu, bendahara sangat susah dihubungi, sedangkan keperluan harus segera dibayarkan," ungkapny.

Gunawan juga mengatakan, pihaknya siap kooperatif agar kades tetap mengikuti kasus sesuai dengan hukum yang berlaku, dan meminta kades agar menjadi tahanan kota dan kembali ke desa sebelum adanya putusan hukum dari pengadilan.

"Seandainya ini tidak disetujui, kami akan menempuh jalan apapun agar kades kami bisa bebas," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) BU Fatkhuri SH melalui Kasi Intel Denny Agusnan SH menyampaikan, pihaknya sudah melimpahkan berkas perkara ini kepihak Pengadilan Negeri (PN) Arga Makmur terhitung dari tanggal (15/7) lalu.

Maka dari pihak Kejari tidak ada kewenangan lagi terhadap kasus Kades Lebong Tandai tersebut.

"Jadi, ketika berkas perkara sudah kita limpahkan, kewenangan penahanan sudah beralih ke PN Arga Makmur, dan juga sudah kita sampaikan tadi kepada para warga agar permohonan penangguhan penahanan silahkan ajukan ke PN Arga Makmur," pungkasnya. (127)